

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Kurikulum

1. Pengertian Manajemen Kurikulum

Menurut Mulyasa, manajemen kurikulum mencakup proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Istilah ini menggambarkan upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Dalam prosesnya, terjalin kerjasama antara pihak internal sekolah yang berperan dalam mengelola, mengatur, dan menyusun tata cara pelaksanaan pembelajaran, semuanya berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan tertentu.¹⁷

Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹⁸ Kurikulum adalah rancangan program pendidikan yang disusun oleh lembaga pendidikan untuk siswa. Kurikulum mencakup rencana dan pengaturan tentang tujuan, materi pembelajaran, isi, serta metode yang digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.¹⁹

Arikunto mengemukakan tentang pengertian manajemen kurikulum merupakan segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian

¹⁷ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal 40.

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 19.

¹⁹ Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: Rajawali Pers, t.t.), hal. 3.

tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar.²⁰ Konsep manajemen kurikulum pada umumnya adalah mengotak-atik mata pelajaran dalam kurikulum, mengubah, dan memperbaiki tujuan dan menambahkan atau mengurangi muatan belajar.²¹

Menurut Rusman, manajemen kurikulum adalah proses pengelolaan kurikulum yang dilakukan secara terorganisir, melibatkan kerja sama berbagai pihak (*kooperatif*), mencakup semua aspek yang relevan (*komprehensif*), serta dijalankan secara menyeluruh, terpadu (*sistemik*), dan terstruktur (*sistematik*). Tujuannya adalah memastikan bahwa tujuan kurikulum dapat tercapai secara efektif dan efisien.²²

Menurut Arikunto, manajemen kurikulum merupakan rangkaian proses kolaboratif yang bertujuan mendukung pencapaian tujuan pengajaran, dengan fokus utama pada upaya meningkatkan kualitas interaksi dalam proses belajar mengajar.²³ Sementara itu, menurut Suryosubroto, manajemen kurikulum adalah serangkaian kegiatan yang berfokus pada menciptakan dan memelihara situasi belajar mengajar di sekolah agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar.²⁴

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk membantu pengelola pendidikan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Proses ini dimulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi

²⁰ Agus Zaenul Fitri, *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam dari Normatif-Filosofis ke Praktis* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 2.

²¹ Dinn Wahyudin, *Manajemen Kurikulum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal 18.

²² Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal 3.

²³ Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), hal 131.

²⁴ B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal 42.

program, dengan tujuan memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara terarah dan efektif.

Manajemen kurikulum adalah proses pengelolaan kurikulum yang dilakukan secara terstruktur, menyeluruh, terpadu, dan melibatkan kerja sama berbagai pihak untuk mencapai tujuan kurikulum. Ruang lingkungannya mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pada level satuan pendidikan, manajemen kurikulum difokuskan pada penerapan dan penyesuaian kurikulum nasional agar selaras dengan kebutuhan daerah serta kondisi sekolah. Hal ini bertujuan menjadikan kurikulum relevan dan terintegrasi dengan siswa serta lingkungan sekolah.²⁵

Luneberg dan Orstein mengemukakan bahwa dalam manajemen kurikulum terdapat perencanaan kurikulum (*planning the curriculum*), pelaksanaan kurikulum (*implementation the curriculum*), dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum (*evaluation the curriculum*).²⁶

2. Prinsip dan Fungsi Manajemen Kurikulum

Terdapat lima prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Produktivitas: Manajemen kurikulum harus berfokus pada hasil yang diharapkan dari kegiatan kurikulum. Penting untuk memastikan bahwa peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang sesuai dengan tujuan kurikulum.

²⁵ Rusman, Manajemen Kurikulum, 2009, hal 3.

²⁶ Tim Dosen Administrasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan (Yogyakarta: UNY Press, 2011), hal 41.

²⁷ Rusman, Manajemen Kurikulum, 2009, hal 4-5.

- b. Demokrasi: Pelaksanaan manajemen kurikulum harus dilakukan secara demokratis, di mana pengelola, pelaksana, dan peserta didik menjalankan peran mereka dengan tanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan kurikulum.
- c. Kerja sama (Kooperatif): Keberhasilan manajemen kurikulum membutuhkan kerja sama positif dari semua pihak yang terlibat.
- d. Efektivitas dan Efisiensi: Manajemen kurikulum harus dirancang sedemikian rupa agar tujuan kurikulum tercapai dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang optimal.
- e. Mengacu pada visi, misi, dan tujuan: Proses manajemen kurikulum harus mampu memperkuat dan mengarahkan visi, misi, serta tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

Selain prinsip-prinsip tersebut, penting juga untuk mempertimbangkan kebijakan pemerintah dan Departemen Pendidikan Nasional, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, standar kurikulum nasional, pedoman pelaksanaan program, kebijakan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), serta berbagai keputusan dan peraturan pemerintah yang terkait dengan lembaga pendidikan atau jenis sekolah tertentu.

Dalam proses pendidikan, manajemen kurikulum diperlukan agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan optimal. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, serta komponen kurikulum secara

maksimal. Adapun beberapa fungsi dari manajemen kurikulum adalah sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang terkait dengan kurikulum.
- b. Meningkatkan keadilan dan memberikan peluang yang sama kepada siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal.
- c. Memastikan pembelajaran menjadi lebih relevan dan efektif, sesuai dengan kebutuhan siswa serta lingkungan di sekitarnya.
- d. Meningkatkan kinerja guru dan aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
- e. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar.
- f. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan kurikulum.

Secara garis besar terdapat beberapa kegiatan berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen kurikulum, yakni:

- a. Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum adalah proses merancang berbagai kesempatan belajar yang bertujuan untuk membantu siswa mengalami perubahan perilaku sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sekaligus mengevaluasi sejauh mana perubahan tersebut terjadi.²⁸

Dalam perencanaan kurikulum, perlu diperhatikan karakteristik kurikulum yang baik, baik dari segi isi, pengorganisasian, maupun peluang untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Hal ini bertujuan

²⁸ Ibid., hal 21.

agar guru, sebagai pelaksana kurikulum, dapat lebih mudah mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Perencanaan ini mencakup pembuatan perangkat pembelajaran, seperti persiapan mengajar, silabus, program semester, program tahunan, pemilihan bahan ajar, hingga pemilihan strategi pembelajaran.²⁹

b. Pelaksanaan kurikulum

Pelaksanaan Kurikulum terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Pada pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah, maka kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Sedangkan pada pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas, maka yang berperan besar adalah guru.³⁰

Pelaksanaan kurikulum di kelas merupakan inti dari proses pendidikan di sekolah. Saat mengajar di kelas, guru fokus pada interaksi antara siswa dan proses belajar mengajar. Namun, aspek fisik, ruangan, dan aktivitas kelas juga tetap diperhatikan, dimulai sejak guru memasuki ruang belajar. Secara manajerial, pelaksanaan di dalam kelas terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan pembelajaran, dan tahap penutupan.³¹

c. Evaluasi Kurikulum

Sistem penilaian kurikulum adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan serangkaian kriteria yang telah disepakati dan dapat

²⁹ Tim Dosen Administrasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan, hal 42.

³⁰ Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal 187.

³¹ Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), hal 140.

dipertanggungjawabkan, untuk menilai keberhasilan kurikulum.³² Penilaian kurikulum bertujuan untuk menilai efektivitas kurikulum yang diterapkan oleh guru. Evaluasi kurikulum berfungsi sebagai umpan balik untuk mengetahui apakah tujuan kurikulum telah tercapai dengan maksimal.³³

3. Ruang Lingkup Manajemen kurikulum

a. Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum adalah proses merancang berbagai peluang pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa mengalami perubahan perilaku sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selain itu, perencanaan ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana perubahan tersebut terjadi pada siswa. Dalam prosesnya, perencanaan kurikulum melibatkan pengumpulan dan pemilihan informasi relevan dari berbagai sumber, yang kemudian digunakan untuk merancang pengalaman belajar yang dapat membantu siswa mencapai tujuan kurikulum yang telah ditetapkan.³⁴

Perencanaan kurikulum perlu dilakukan dengan hati-hati, rinci, dan menyeluruh, serta mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana tersebut. Menurut Hamalik dalam Agus Zaenul Fitri, ada enam prinsip dalam perencanaan kurikulum yang perlu diperhatikan, yaitu:

³² Ibid., hal 237.

³³ Tim Dosen Administrasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan, hal 44.

³⁴ Suhendra, Manajemen dan Organisasi dalam Realita Kehidupan (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hal 39-40.

- 1) Perencanaan kurikulum harus berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang dialami siswa.
- 2) Perencanaan kurikulum disusun berdasarkan keputusan terkait isi dan proses pembelajaran, yang mencakup materi, pokok bahasan, bidang studi, serta cara penyampaian materi tersebut.
- 3) Perencanaan kurikulum mencakup keputusan tentang isu dan topik yang akan dibahas.
- 4) Perencanaan kurikulum melibatkan berbagai pihak, seperti kelompok guru mata pelajaran, kepala sekolah, pemerhati pendidikan, orang tua, stakeholder, dan pihak-pihak lain yang terlibat.

Perencanaan kurikulum memiliki beberapa fungsi, di antaranya: ³⁵

- 1) Sebagai pedoman yang memberikan petunjuk tentang jenis peserta didik yang dibutuhkan, media yang digunakan untuk menyampaikan materi, tindakan yang harus dilakukan, sumber daya seperti biaya, tenaga, dan fasilitas yang diperlukan, serta sistem kontrol dan evaluasi untuk mencapai tujuan manajemen organisasi.
- 2) Sebagai penggerak untuk menjalankan organisasi dan tata kelola yang bertujuan menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Perencanaan kurikulum yang baik memberikan kontribusi besar dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan, dan perlu memuat informasi kebijakan yang relevan serta pengetahuan dan kepemimpinan yang dimiliki.

³⁵ Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, 2006, hal 152.

- 3) Sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Kurikulum merupakan aspek yang sangat penting dan harus dirancang serta disusun dengan dengan sebaik mungkin. Kurikulum berfungsi sebagai panduan untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah. Agar pelaksanaan kurikulum dapat berjalan efektif, perencanaan kurikulum perlu mengikuti langkah-langkah dan prosedur yang telah ditentukan:³⁶

1) Menentukan Landasan Kurikulum

Pada tahap ini, ditentukan dasar-dasar yang menjadi landasan dalam perencanaan kurikulum, yang meliputi: landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan teknologi. Penentuan landasan kurikulum dibagi menjadi empat bagian, yaitu:³⁷

- a) Landasan filosofis berperan dalam memberikan batasan-batasan mengenai pendidikan yang akan dilaksanakan. Pengembangan kurikulum harus sesuai dengan landasan filosofis yang ada, dan kurikulum yang diterapkan harus memastikan agar siswa dapat belajar sesuai dengan konsep Kurikulum Merdeka.
- b) Landasan psikologis berfokus pada identifikasi dan pembahasan tentang dasar psikologis serta implikasinya dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum berfungsi sebagai panduan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, dan psikologi

³⁶ Marliza Oktapiani, "Perencanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Indonesia," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 2, no. 1 (7 Januari 2019): 71–96, doi:10.34005/tahdzib.v2i1.471.

³⁷ Desmy Yenti, Nelly Octovia, dan Fadriati, "Landasan Pengembangan Kurikulum Merdeka," *IndoMathEdu Intellectuals Journal* Vol. 5, no. 3 (2024): 3317–27.

digunakan sebagai pertimbangan untuk menilai apakah kurikulum dapat diimplementasikan dengan baik.

- c) Sosiologi pendidikan berfungsi untuk menganalisis hubungan antara pendidikan dan masyarakat, dengan memperhatikan berbagai konsep umum. Sosiologi pendidikan adalah kajian ilmiah tentang proses sosial dan pola interaksi sosial dalam sistem pendidikan.
- d) Landasan teknologi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan, dan merupakan bagian penting dalam pembelajaran hingga saat ini. Seiring dengan kemajuan teknologi, bidang ini memberikan ruang besar untuk mendukung perkembangan yang pesat, dan pendidikan harus mampu mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus maju.

2) Menentukan tujuan Kurikulum

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan tujuan kurikulum antara lain: (a) tujuan pendidikan nasional, karena ini menjadi dasar bagi setiap lembaga pendidikan; (b) kesesuaian antara tujuan kurikulum dengan tujuan lembaga pendidikan yang bersangkutan; (c) kesesuaian tujuan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja; (d) kesesuaian tujuan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini; dan (e) kesesuaian tujuan kurikulum dengan sistem nilai dan aspirasi yang ada di masyarakat.

Menurut Pratt, terdapat tujuh kriteria dalam merumuskan tujuan kurikulum:³⁸

- a) Spesifik dan Terukur: Tujuan harus menunjukkan hasil belajar yang dapat diamati.
- b) Konsisten: Sejalan dengan tujuan kurikulum secara umum.
- c) Jelas: Ditulis dengan bahasa yang tepat untuk memudahkan pelaksanaannya.
- d) Fleksibel: Dapat disesuaikan dengan situasi, bukan standar kaku.
- e) Bermanfaat: Memberikan nilai guna bagi peserta didik dan masyarakat.
- f) Bermakna: Dipilih berdasarkan nilai yang penting.
- g) Sesuai: Memperhatikan kebutuhan, kemampuan, latar belakang, minat, dan perkembangan peserta didik.

3) Menentukan Isi Kurikulum

Ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih isi kurikulum, yaitu: (a) signifikansi, yang mengukur seberapa penting isi kurikulum dalam suatu disiplin atau topik studi; (b) validitas, yang berkaitan dengan keaslian dan ketepatan isi kurikulum; (c) relevansi sosial, yang menunjukkan keterkaitan antara isi kurikulum dengan nilai moral, cita-cita, masalah sosial, isu kontroversial, dan lain-lain, untuk membantu siswa menjadi anggota masyarakat yang efektif; (d) *utilitas* atau kegunaan, yang berhubungan dengan manfaat isi kurikulum dalam mempersiapkan siswa untuk

³⁸ Kaber Achasius, Pengembangan Kurikulum (Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdikbud., 1988), 32.

kehidupan dewasa; (e) *learnability* atau kemudahan untuk dipelajari, yang mencakup kemampuan siswa dalam memahami isi kurikulum; dan (f) minat, yang berkaitan dengan ketertarikan siswa terhadap isi kurikulum tersebut.

Ronald juga mengemukakan beberapa kriteria pemilihan isi kurikulum sebagai berikut.³⁹

- a) Validitas dan signifikansi bahan (*subject matter*) sebagai disiplin ilmu.
 - b) Keseimbangan ruang lingkup bahan (*scope*) dan kedalamannya (*depth*).
 - c) Kesesuaian dengan kebutuhan dan minat siswa.
 - d) Daya tahan (*durability*) bahan.
 - e) Hubungan logis bahan antara ide pokok (*main ideas*) dan konsep dasar (*basic concept*).
 - f) Kemampuan siswa mempelajari bahan tersebut.
 - g) Kemungkinan menjelaskan bahan itu dengan data dari disiplin ilmu lain.
- 4) Menentukan Metode/Strategi Pembelajaran

Secara praktis, strategi pembelajaran adalah langkah-langkah dan metode yang digunakan oleh pengajar untuk memfasilitasi siswa agar dapat belajar secara aktif dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Saat ini, ada berbagai macam metode dan strategi pembelajaran, seperti ceramah, diskusi, CTL, dan lain-lain. Dalam

³⁹ Ronald C. Doll, Curriculum Improvement. Decision Making and Process (Boston: Ally and Bacon, yent), 54.

memilih metode atau strategi pembelajaran, guru harus memastikan bahwa metode yang dipilih sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

5) Menentukan Sumber Belajar

Sumber belajar dapat berasal dari berbagai media seperti buku, majalah, koran, jurnal, alam sekitar, televisi, internet, dan lainnya. Pemilihan sumber belajar harus disesuaikan dengan tujuan, materi, dan strategi pembelajaran yang digunakan.

Sumber belajar memiliki beberapa fungsi, antara lain:⁴⁰

- a) Pengembangan Materi Ajar: Menyediakan bahan ajar yang disusun secara ilmiah dan objektif.
- b) Dukungan Pembelajaran: Membantu pelaksanaan program pembelajaran secara terstruktur dan sistematis.
- c) Efisiensi Waktu: Mempermudah pengajar dalam mengelola waktu sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif.
- d) Meringankan Tugas Pengajar: Mengurangi beban pengajar dalam menyampaikan materi, sehingga mereka dapat lebih fokus memberi dorongan dan motivasi kepada siswa.

6) Menentukan Strategi Penilaian/Evaluasi Kurikulum

Berdasarkan pelaksanaan dan tujuannya, evaluasi kurikulum dapat dibagi menjadi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif umumnya digunakan untuk memperbaiki kurikulum, sementara evaluasi sumatif bertujuan untuk menilai sejauh mana

⁴⁰ M. Ramli AR, "Sumber Belajar Dalam Kurikulum Berbasis Teknologi Dan Informasi," Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin. Vol. 1, no. 01 (2011): 121–134.

keberhasilan suatu kurikulum. Teknik yang digunakan dalam evaluasi kurikulum dapat berupa teknik non-tes seperti wawancara, angket, observasi, dan ceklist, serta teknik tes seperti tes lisan, tes tertulis, atau tes praktikum.

b. Organisasi Kurikulum

Organisasi kurikulum adalah struktur atau rancangan bahan pelajaran yang dirancang untuk memudahkan siswa dalam mempelajari materi dan melaksanakan kegiatan belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif.⁴¹ Organisasi kurikulum berkaitan erat dengan pengaturan materi yang ada dalam kurikulum, dimana sumber bahan pelajaran tersebut berasal dari nilai budaya, nilai sosial, aspek siswa dan masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Rusman, secara umum terdapat dua jenis organisasi kurikulum, yaitu sebagai berikut:⁴²

1) Kurikulum berdasarkan Mata Pelajaran (*Subject Curriculum*)

a) Mata Pelajaran yang Terpisah-pisah (*Separated Subject Curriculum*)

Dalam proses pembelajarannya, bentuk kurikulum ini cenderung mengabaikan aktivitas siswa, dengan fokus utama pada penerimaan dan penghafalan materi pembelajaran oleh siswa. Selain itu, materi yang dipelajari siswa umumnya tidak relevan

⁴¹ Rusman, Manajemen Kurikulum, 2009, hal 60.

⁴² Ibid., 62.

karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.⁴³

Materi pembelajaran yang bersifat informasi sebagian besar akan diperoleh siswa dari buku pelajaran. Siswa cenderung lebih banyak menghafal pengetahuan yang terpisah-pisah, sehingga kemampuan mereka kurang berkembang dan tidak mengoptimalkan potensi individu mereka secara maksimal.⁴⁴

Salah satu kelemahan dari bentuk ini adalah materi yang diajarkan terpisah-pisah, sehingga tidak menunjukkan hubungan antara satu materi dengan materi lainnya. Namun, salah satu kelebihanannya adalah kurikulum ini mudah untuk dipola, dibentuk, dirancang, bahkan dapat diperluas atau dipersempit sesuai dengan waktu yang tersedia.

b) Mata Pelajaran Gabungan (Correlated Curriculum)

Korelasi kurikulum, yang sering disebut *broad field*, pada dasarnya adalah penggabungan beberapa mata pelajaran sejenis, seperti IPA (yang terdiri dari fisika, biologi, dan kimia) serta IPS (yang mencakup sejarah, geografi, sosiologi, dan antropologi). Korelasi kurikulum ini menggabungkan mata pelajaran sejenis secara bersamaan. Dengan menyatukan materi-materi yang terpisah, kurikulum ini dapat memperluas wawasan siswa melalui berbagai disiplin ilmu yang saling terkait.⁴⁵

⁴³ Ibid., hal. 62.

⁴⁴ Ibid., hal. 63.

⁴⁵ Ibid., hal. 64.

Materi dalam kurikulum ini memungkinkan setiap pokok atau inti pelajaran untuk dipahami lebih mendalam dibandingkan dengan mata pelajaran yang terpisah-pisah. Dalam korelasi kurikulum, guru memiliki kesempatan untuk lebih fokus pada penyampaian prinsip-prinsip dasar dan generalisasi, sehingga materi dapat disampaikan secara lebih menyeluruh. Hal ini juga dapat meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran, karena mereka mempelajari materi yang terintegrasi dan lebih relevan.

2) Kurikulum Terpadu (Integrated Curriculum)

Kurikulum ini menekankan pentingnya mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam setiap topik pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya mempelajari materi secara terpisah, tetapi dapat melihat hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pengetahuan dari berbagai bidang studi, sehingga batas-batas antar mata pelajaran menjadi lebih fleksibel. Selain itu, kurikulum ini memberikan peluang bagi siswa untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka, serta memberikan pengalaman langsung dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka.⁴⁶

a) *Core Curriculum* (Kurikulum Inti)

Kurikulum ini memanfaatkan materi dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu untuk membantu siswa dalam

⁴⁶ Ibid., hal 65-66.

mengatasi atau memecahkan masalah yang mereka hadapi. Pengembangan program pembelajaran dalam kurikulum ini sebaiknya dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dalam pelaksanaannya, kurikulum terpadu memerlukan dukungan keterampilan guru dalam mengelola waktu dan kegiatan agar proses pembelajaran lebih efektif, efisien, dan memberikan makna yang lebih dalam bagi siswa.⁴⁷

b) *Sosial Functions* dan *Persistens Situations* (Fungsi sosial & situasi persisten)

Dalam fungsi sosial ini, terdapat berbagai aktivitas manusia sebagai individu dan anggota masyarakat yang bisa dijadikan topik pembelajaran, antara lain: (1) menjaga dan memastikan keamanan masyarakat; (2) melindungi dan melestarikan kehidupan, kekayaan, dan sumber daya alam; (3) komunikasi dan transportasi; (4) kegiatan rekreasi; (5) produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa; (6) ekspresi keindahan; (7) kegiatan pendidikan; (8) pengembangan kepribadian. Fungsi sosial ini melibatkan banyak aktivitas manusia yang bisa dijadikan bahan pembelajaran, karena kegiatan manusia dalam masyarakat selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi, sehingga pokok bahasan dalam fungsi sosial harus bersifat dinamis.⁴⁸

Sebagai pengembangan dari fungsi sosial, terdapat konsep *persistent life situation*, yang dalam kurikulum ini mencakup

⁴⁷ Ibid., hal 67.

⁴⁸ Ibid., hal 68.

pembahasan yang lebih mendalam dan terfokus. Dalam *persistent life situation*, karakteristik utamanya adalah situasi-situasi yang selalu dihadapi oleh manusia sepanjang hidupnya, baik di masa lalu, saat ini, maupun di masa depan.

c) *Experience* atau *Activity Curriculum* (Kurikulum Pengalaman atau Kegiatan)

Kurikulum ini lebih menekankan pada kegiatan atau pengalaman siswa yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan yang terintegrasi dengan lingkungan dan potensi siswa. Meskipun kurikulum ini fokus pada kegiatan vokasional (kejuruan), namun tetap tidak mengabaikan aspek intelektual dan akademik siswa. Salah satu ciri khas dari kurikulum ini adalah memberikan pendidikan keterampilan atau kejuruan, namun tetap mencakup pengembangan kemampuan intelektual yang relevan dengan keterampilan tersebut. Siswa tidak hanya belajar secara manual, tetapi secara reaktif dan berfokus pada pemecahan masalah sesuai dengan keterampilan yang sedang dipelajari.⁴⁹

Kurikulum terpadu ini pertama kali dipelopori oleh John Dewey, dengan inti bahwa pembelajaran harus dimulai dengan membahas suatu topik atau masalah yang diselesaikan secara menyeluruh, melibatkan berbagai disiplin ilmu dan faktor lingkungan. Konsep "learning by doing" dan "problem-based learning" yang diperkenalkan oleh Dewey banyak diterapkan dalam

⁴⁹ Ibid., hal 69-71.

kurikulum berbasis aktivitas, yang dalam praktiknya sering dikenal sebagai pembelajaran proyek.⁵⁰

c. Implementasi Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkat, yaitu tingkat sekolah dan tingkat kelas. Meskipun kepala sekolah dan guru memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam pelaksanaan kurikulum, serta perbedaan dalam administrasi antara tingkat sekolah dan kelas, kedua tingkat ini tetap saling terhubung dan memiliki tanggung jawab bersama dalam menjalankan proses administrasi kurikulum.⁵¹

1) Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Sekolah

Di tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan kurikulum di sekolah yang dipimpinnya. Tugas kepala sekolah mencakup berbagai kegiatan, seperti merencanakan kegiatan tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan, memimpin rapat, membuat notulen rapat, mengolah data statistik, dan menyusun laporan.

a) Kepala Sekolah sebagai Pemimpin

Tanggung jawab kepala sekolah adalah memimpin, mengelola, dan mengembangkan kurikulum di sekolah. Sebelum pelaksanaan dan pengembangan, kepala sekolah juga bertanggung jawab dalam penyusunan kurikulum itu sendiri.⁵² Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi individu atau kelompok agar mereka

⁵⁰ Ibid., hal 71.

⁵¹ Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, 2010, hal 173.

⁵² Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal 47.

bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin menggunakan berbagai pendekatan dalam kepemimpinannya, seperti bersikap persuasif, mempengaruhi, atau cara lainnya. Pendekatan-pendekatan ini sering digunakan oleh kepala sekolah untuk memotivasi stafnya agar mereka bertindak sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah.⁵³

Secara umum, seorang pemimpin, termasuk kepala sekolah, perlu memiliki sifat, sikap, dan perilaku tertentu yang menjadi kelebihan dibandingkan dengan orang lain atau bawahannya. Beberapa sifat atau sikap tersebut antara lain:

- (1)Kemampuan dalam mengelola sekolah dengan baik (kemampuan manajerial.⁵⁴
- (2)Keahlian profesional yang mendalam dalam bidang atau jabatannya.
- (3)Sikap rendah hati dan sederhana.⁵⁵

b) Perilaku Seorang Administrasi

Perilaku seorang administrator sangat penting dalam kaitannya dengan perencanaan program, pengorganisasian staf, koordinasi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan supervisi, serta penilaian terhadap tenaga pendidik dan staf sekolah.

Administrasi pendidikan ini berada di bawah pengawasan direktur

⁵³ W. Mantja, Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pengajaran (Malang: Wineka Media, 2005), hal 56.

⁵⁴ Abdullah Munir, Menjadi Kepala Sekolah Efektif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hal 6.

⁵⁵ Ibid., hal 175.

bidang pendidikan, pusat pengembangan kepala kantor wilayah, kepala kantor kabupaten dan kecamatan, serta kepala sekolah.⁵⁶

c) Penyusunan Rencana Tahunan

Perencanaan berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan kepemimpinan. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan dibagi menjadi perencanaan jangka panjang (misalnya rencana 5 hingga 10 tahun) dan perencanaan jangka pendek (seperti rencana tahunan atau bulanan). Sebagai seorang administrator, kepala sekolah perlu menyusun rencana-rencana dalam beberapa bidang, antara lain:

- (1) Perencanaan di bidang kurikulum
- (2) Perencanaan di bidang personal atau tenaga kependidikan
- (3) Perencanaan di bidang sarana dan prasarana pendidikan
- (4) Perencanaan di bidang administrasi sekolah
- (5) Perencanaan di bidang pembiayaan atau anggaran pendidikan
- (6) Perencanaan dalam pembinaan organisasi sekolah
- (7) Perencanaan dalam hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan.⁵⁷

Pada tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Tanggung jawab tersebut adalah kepala sekolah sebagai pemimpin, sebagai administrator, penyusun rencana tahunan, pembinaan organisasi sekolah, koordinator dalam

⁵⁶ Nana Syaudih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal 78.

⁵⁷ Ibid., hal 176.

pelaksanaan kurikulum, memimpin rapat kurikuler, sistem komunikasi dan pembinaan kurikuler.⁵⁸

d) Pembinaan Organisasi Sekolah

Pelaksanaan kurikulum memerlukan dukungan dari organisasi sekolah yang solid dan lengkap. Organisasi yang baik memerlukan keterampilan manajerial yang memadai dari kepala sekolah agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Semua bagian organisasi harus bekerja sama secara terkoordinasi, dengan fokus yang jelas untuk mencapai tujuan instruksional dan kurikuler yang telah ditetapkan oleh sekolah.⁵⁹

e) Koordinasi dalam pelaksanaan kurikulum

Koordinasi bertujuan untuk memastikan adanya keselarasan sikap, pemikiran, dan tindakan antara seluruh personel serta staf suborganisasi di dalam sekolah, sehingga pelaksanaan kurikulum dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan koordinasi ini sejalan dengan fungsi administrasi, yang meliputi:

- (1) Koordinasi dalam penyusunan rencana.
- (2) Koordinasi dalam pengorganisasian tugas dan tanggung jawab.
- (3) Koordinasi dalam memotivasi personel untuk bertindak sesuai tujuan.
- (4) Koordinasi dalam pengawasan dan supervisi kegiatan.
- (5) Koordinasi dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

⁵⁸ Rusman, Manajemen Kurikulum, 2009, hal 74.

⁵⁹ Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, 2010, hal 178.

(6) Koordinasi dalam pelaksanaan program evaluasi.⁶⁰

f) Kegiatan Memimpin Rapat Kurikuler

Rapat guru merupakan wadah yang efektif untuk membahas berbagai hal terkait kurikulum sekolah, seperti pelaksanaan, hasil yang telah dicapai, dan kendala yang dihadapi. Rapat ini bisa dijadwalkan secara rutin, misalnya di awal tahun ajaran, pertengahan semester, atau akhir tahun ajaran, serta dapat diadakan secara mendadak sesuai dengan kebutuhan. Penyelenggaraan rapat disesuaikan dengan isu yang akan dibahas, yang dapat dipimpin oleh kepala sekolah, kepala suborganisasi, atau ketua bidang studi. Tujuan utama rapat ini adalah untuk mencari solusi dan menyamakan pandangan dalam pengelolaan kurikulum sekolah.⁶¹

g) Sistem Komunikasi dan Pembinaan Kurikulum

Seorang pemimpin yang efektif harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam proses administrasi, baik di dalam organisasi (seperti staf dan guru) maupun di luar organisasi (misalnya, masyarakat atau lembaga terkait). Komunikasi yang baik menciptakan hubungan interaktif yang memungkinkan kerja sama berjalan dengan lancar, sehingga tujuan administrasi kurikulum dapat tercapai. Inti dari komunikasi adalah proses penyampaian pesan secara jelas dari satu pihak ke pihak lain, yang bertujuan untuk membangun kerja sama dalam

⁶⁰ Nana Syaudih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, hal 98.

⁶¹ E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal 30.

mencapai tujuan bersama.⁶² Selain itu, keberhasilan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran sangat bergantung pada kerja sama tim yang kuat, transparan, dan melibatkan semua pihak yang terkait dalam dunia pendidikan.⁶³

2) Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Kelas

Pembagian tugas guru harus diatur secara administratif untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kurikulum di kelas. Tugas-tugas ini meliputi tiga jenis kegiatan administratif, yaitu: pembagian tugas mengajar, pembagian tugas pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, dan pembagian tugas bimbingan belajar.⁶⁴ Proses pembagian tugas dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh kepala sekolah, dan hasilnya dicatat dalam jadwal pelajaran untuk satu semester atau satu tahun ajaran. Pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas mencakup berbagai kegiatan, antara lain.

a) Kegiatan dalam bidang proses belajar-mengajar

Kegiatan ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab seorang guru sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Beberapa kegiatan tersebut meliputi:

- (1)Menyusun rencana pelaksanaan program atau unit pembelajaran.
- (2)Membuat jadwal kegiatan serta jadwal pelajaran
- (3)Melengkapi daftar penilaian untuk mencatat kemajuan belajar dan perkembangan siswa.

⁶² Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, 2010, hal 180.

⁶³ E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, hal 31.

⁶⁴ Suryosubroto, Tatalaksana Kurikulum (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal 14.

(4) Mengisi buku laporan pribadi siswa⁶⁵

b) Pembinaan kegiatan ekstrakurikuler.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan aktivitas pendidikan di luar kurikulum utama, namun tetap memiliki nilai pedagogis dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan sekolah. Aktivitas ini mencakup berbagai kegiatan di sekolah yang tidak termasuk dalam program kurikulum formal. Sebagian besar kegiatan ekstrakurikuler dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh organisasi siswa intra sekolah.⁶⁶ Meski tidak masuk dalam kurikulum utama, kegiatan ekstrakurikuler sebenarnya adalah bagian integral dari kurikulum sekolah, dengan melibatkan peran guru. Oleh karena itu, kegiatan ini harus direncanakan dengan baik dan mendapatkan dukungan penuh dari para guru. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan, perlu disediakan guru penanggung jawab, anggaran biaya yang memadai, serta perlengkapan yang diperlukan.

c) Kegiatan Bimbingan Belajar

Guru memiliki peran utama dalam membimbing siswa untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki dan membantu mengatasi masalah serta kesulitan yang dihadapi siswa. Tujuan dari bimbingan ini adalah agar siswa dapat belajar untuk membimbing dirinya sendiri secara mandiri.

Tujuan utama bimbingan yang diberikan oleh guru adalah untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan mereka

⁶⁵ Suryosubroto, Tatalaksana Kurikulum.

⁶⁶ Ibid., hal 59.

sehingga mereka dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagai contoh, seorang siswa yang ingin menjadi juara kelas dengan mengoptimalkan teknik belajar yang dimilikinya.⁶⁷ Bimbingan ini memberikan dukungan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa, agar mereka dapat mandiri dalam menghadapinya, serta membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekitar seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat.

d. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis untuk mengumpulkan serta mengolah informasi, yang bertujuan memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki kurikulum. Fungsi dari evaluasi kurikulum adalah untuk memperbaiki kurikulum secara berkelanjutan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun satuan pendidikan.⁶⁸

Hamid Hasan dalam bukunya *Evaluasi Kurikulum* menjelaskan bahwa evaluasi kurikulum adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum, yang nantinya digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menilai dan memahami kurikulum dalam konteks tertentu. Sementara itu, menurut Permendikbud No. 159 Tahun 2014, evaluasi kurikulum adalah serangkaian kegiatan yang dirancang secara terencana, sistematis, dan

⁶⁷ Zainal Arifin, *Pengembangan Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam* (Yogyakarta: DIVA Press, 2012), hal 37.

⁶⁸ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 159 Tahun 2014 tentang *Evaluasi Kurikulum.*, t.t.

terintegrasi untuk mengumpulkan serta mengolah informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam upaya memperbaiki kurikulum.⁶⁹

Menurut Tyler, yang dikutip oleh Rusman, evaluasi berfokus pada upaya untuk mengukur sejauh mana perubahan yang terjadi pada hasil belajar. Hasil belajar ini umumnya diukur melalui tes. Tujuan dari evaluasi menurut Tyler adalah untuk mengetahui sejauh mana perubahan tersebut terjadi, baik dalam aspek statistik maupun edukatif.⁷⁰ Berdasarkan pandangan Tyler, evaluasi dalam konteks kurikulum dapat dipahami sebagai upaya untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada individu setelah mengikuti proses pembelajaran.

Dalam manajemen kurikulum, evaluasi kurikulum memiliki peran yang sangat penting, baik untuk menentukan kebijakan secara umum maupun dalam pengambilan keputusan terkait kurikulum itu sendiri. Hasil evaluasi ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan pendidikan dan pengembang kurikulum untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam pengembangan sistem pendidikan serta model kurikulum yang diterapkan.⁷¹

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, evaluasi kurikulum dapat disimpulkan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis untuk mengumpulkan serta mengolah informasi dengan tujuan memberikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk

⁶⁹ Muhammad Khairul Rijal Muhammad Nasir, *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam: Pengantar Teoris dan Praktis* (Samarinda: Bo' Kampung Publishing, 2020), hal 71.

⁷⁰ Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal 93.

⁷¹ Fitri Agus Zaenal, *Manajemen kurikulum pendidikan Islam* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hal 43.

memperbaiki kurikulum. Evaluasi kurikulum bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum secara berkelanjutan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun satuan pendidikan. Dalam hal ini, evaluasi kurikulum juga berfokus pada mengukur sejauh mana perubahan terjadi pada hasil belajar siswa dan digunakan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih baik.

1) Fungsi dan Tujuan Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum memiliki berbagai fungsi, di antaranya:⁷²

- a) Edukatif, untuk menilai sejauh mana kurikulum berhasil mencapai tujuan pendidikan.
- b) Instruksional, untuk mengevaluasi penerapan kurikulum dalam proses belajar mengajar.
- c) Diagnosis, untuk mengumpulkan informasi yang berguna dalam memperbaiki kurikulum pendidikan.
- d) Administratif, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan program pendidikan.

Sedangkan Tujuan dilaksanakannya evaluasi kurikulum antara lain adalah:

- a) Menyediakan informasi mengenai pengembangan dan pelaksanaan kurikulum yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.
- b) Menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan kurikulum serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam suatu konteks tertentu.

⁷² Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal 25.

- c) Mengembangkan alternatif solusi untuk memperbaiki kurikulum.
- d) Memahami dan menjelaskan karakteristik serta pelaksanaan suatu kurikulum.⁷³

2) Model Evaluasi Kurikulum

Dalam melakukan evaluasi kurikulum, terdapat berbagai model yang dapat digunakan. Namun, pada bagian ini, hanya akan dibahas salah satu model evaluasi kurikulum yang paling dikenal dan sering digunakan oleh evaluator di dunia pendidikan, yaitu model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Seperti yang tercermin dari namanya, model ini terdiri dari empat jenis evaluasi: *context* (konteks), *input* (masukan), *process* (proses), dan *product* (hasil).

Keempat aspek evaluasi ini penting untuk dinilai, baik selama proses pengembangan kurikulum atau program pendidikan berlangsung maupun setelah selesai. Berikut penjelasan masing-masing aspek evaluasi tersebut:⁷⁴

- a) *Context* (Konteks), yaitu evaluasi terhadap situasi atau latar belakang yang mempengaruhi tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam program tersebut, seperti masalah pendidikan yang ada, kondisi ekonomi negara, pandangan hidup masyarakat, dan sebagainya.
- b) *Input* (Masukan), yaitu evaluasi terhadap sarana, sumber daya, bahan, dan rencana strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut.

⁷³ Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal 42-43.

⁷⁴ Mohammad Ali R. Ibrahim, "Teori Evaluasi Pendidikan", dalam Mohammad Ali, dkk., *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan: Bagian II, Ilmu Pendidikan Praktis* (Bandung: imtima, 2009), hal 116.

- c) *Process* (Proses), yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan strategi dan penggunaan sarana, sumber daya, serta bahan dalam kegiatan yang berlangsung di lapangan.
- d) *Product* (Hasil), yaitu evaluasi terhadap hasil yang dicapai, baik selama proses maupun pada akhir pengembangan program pendidikan.

Einstein mengemukakan lima fungsi utama evaluasi pendidikan, yakni untuk mendiagnosis, merevisi kurikulum, membandingkan, mengantisipasi kebutuhan pendidikan, serta menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai.⁷⁵ Evaluasi kurikulum bertujuan untuk memperbaiki kurikulum dengan cara mengevaluasi proses pelaksanaan yang telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan dari evaluasi kurikulum adalah untuk menilai kinerja keseluruhan kurikulum berdasarkan berbagai kriteria yang ada.⁷⁶ Namun, S. Hamid Hasan dalam bukunya "Evaluasi Kurikulum" menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya, seorang evaluator bisa saja hanya melakukan satu jenis evaluasi atau menggabungkan dua jenis evaluasi atau lebih.

B. Pendidikan Inklusi

1. Pengertian Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusif muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang menggunakan pendekatan segregasi. Sistem segregasi adalah metode

⁷⁵ Rusman, Manajemen Kurikulum, 2009, hal 98.

⁷⁶ Ibid., hal 99.

pendidikan yang dirancang khusus untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus atau kelainan tertentu. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan mereka agar mampu berinteraksi secara mandiri dalam masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem segregasi justru memisahkan anak-anak tersebut dari lingkungan sosialnya. Berdasarkan realitas tersebut, lahirlah berbagai konsep pendidikan inklusif sebagai alternatif solusi.⁷⁷

Inklusi juga dapat diartikan sebagai upaya memastikan setiap siswa yang memiliki hambatan dapat benar-benar terlibat dalam berbagai aspek kehidupan sekolah secara menyeluruh. Hal ini mencakup penerimaan anak-anak dengan hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan sekolah, interaksi sosial, serta pembentukan konsep diri sesuai visi dan misi sekolah. Pendidikan inklusif sendiri adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah umum terdekat, di kelas reguler bersama teman-teman seusianya.⁷⁸

Menurut Abose, pendidikan inklusif merupakan suatu pendidikan terintegrasi di mana anak berkebutuhan khusus dapat berpartisipasi untuk memperoleh layanan pendidikan dengan sistem, metodologi, dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.⁷⁹

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberi kesempatan kepada semua siswa yang memiliki kelainan dan

⁷⁷ Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusif* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal. 47-48.

⁷⁸ Lilis Lismaya, "*Pengertian Pendidikan Inklusif*" (Banten, t.t.), <http://www.melaticeria.or.id/2015/07/pendidikan-inklusif-masa-kini.html>.

⁷⁹ Muchamad Irvan dan Muhammad Nurrohman Jauhari, "Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Perubahan Paradigma Pendidikan di Indonesia," *Jurnal FKIP Unipa Surabaya*, 2018, 175–87.

memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan siswa pada umumnya.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan pendidikan inklusif adalah menjamin bahwa setiap anak, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, memperoleh kesempatan setara untuk mengakses pendidikan di sekolah reguler terdekat. Pendekatan ini menekankan prinsip akses yang terbuka dan perlakuan tanpa diskriminasi, serta berfokus pada penyediaan pendidikan yang berkualitas sesuai kebutuhan individu masing-masing siswa. Melalui konsep ini, diharapkan setiap anak dapat berkembang secara maksimal dalam lingkungan yang mendukung dan menghormati keberagaman.

2. Tujuan Pendidikan Inklusi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, tujuan pendidikan inklusif adalah:⁸¹

- a. Memberikan peluang seluas-luasnya bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus dalam aspek fisik, emosional, mental, atau sosial, serta siswa dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai kemampuan dan kebutuhan mereka.

⁸⁰ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. pasal 1, t.t.

⁸¹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. pasal 2, t.t.

- b. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman dan menerapkan prinsip non-diskriminasi, sehingga semua siswa dapat belajar dalam lingkungan yang inklusif dan mendukung.

3. Landasan Pendidikan Inklusi

Berbagai dasar yang melandasi pendidikan inklusi meliputi:

- a. Landasan Filosofis

Pendidikan inklusif di Indonesia berlandaskan pada Pancasila, yang merupakan lima prinsip utama dan cita-cita bangsa, serta didukung oleh konsep Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu). Filosofi ini mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman manusia, baik secara vertikal maupun horizontal.

Keberagaman vertikal mencakup perbedaan dalam kecerdasan, kemampuan fisik, finansial, pangkat, dan pengendalian diri. Sementara itu, keberagaman horizontal meliputi perbedaan suku, ras, budaya, bahasa, agama, lokasi geografis, dan afiliasi politik. Filosofi ini menekankan bahwa meskipun manusia beragam, mereka memiliki misi yang sama sebagai makhluk Tuhan di bumi, sehingga diperlukan rasa saling membutuhkan dan membangun kebersamaan.⁸²

Dalam konteks pendidikan, filosofi ini mendorong terciptanya sistem yang memungkinkan interaksi antar siswa dengan latar belakang beragam. Interaksi ini diharapkan membangun sikap saling toleransi, menghormati, dan menghargai, yang pada akhirnya mendukung terciptanya kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. .

⁸² Ahmad Nawawi, Pendidikan Inklusif Bagi Anak Low Vision (Bandung: Makalah, Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2010).

b. Landasan Yuridis

Pendidikan inklusif memiliki dasar hukum internasional yang merujuk pada Deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994), yang ditegaskan oleh para menteri pendidikan dunia. Deklarasi ini merupakan penguatan atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 1948 dan berbagai deklarasi berikutnya, termasuk Peraturan Standar PBB tahun 1993 tentang kesempatan setara bagi individu dengan kebutuhan khusus dalam mendapatkan pendidikan. Deklarasi Salamanca menekankan bahwa, sejauh memungkinkan, semua anak sebaiknya belajar bersama tanpa memandang kesulitan atau perbedaan yang mereka miliki.⁸³

Di Indonesia, pendidikan inklusif dijamin melalui berbagai peraturan, yaitu: 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32, yang menyebutkan bahwa pendidikan bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus atau kecerdasan luar biasa dapat diselenggarakan secara inklusif atau melalui sekolah khusus, 4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1986 Pasal 1 Ayat 1, yang mengatur bahwa pendidikan terpadu adalah penyelenggaraan program pendidikan bagi anak dengan disabilitas bersama anak normal di lembaga pendidikan umum menggunakan kurikulum yang sama. 5) Surat Edaran Dirjen Nomor

⁸³ Istiningsih, Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Klego 1 Kabupaten Boyolali (Surakarta: Tesis, Jurusan Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005).

380/C.C6/MN/2003, yang secara khusus membahas tentang pelaksanaan pendidikan inklusif. Landasan ini menunjukkan komitmen nasional dan internasional untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

c. Landasan Pedagogis

Landasan pedagogis dari pendidikan inklusif dapat ditemukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, berilmu, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.⁸⁴

Dengan demikian, melalui pendidikan, peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus diharapkan dapat dibentuk menjadi individu yang demokratis dan bertanggung jawab, yang mampu menghargai perbedaan dan berkontribusi dalam masyarakat. Tujuan ini sulit tercapai jika mereka terus diisolasi di sekolah-sekolah khusus, terpisah dari teman sebayanya. Meskipun keterbatasan mereka, penting bagi mereka untuk diberikan kesempatan untuk belajar bersama dengan teman sebaya.

d. Landasan Empiris

Landasan empiris penelitian mengenai manajemen inklusi telah banyak dilakukan di negara-negara Barat sejak tahun 1980-an, dengan penelitian skala besar yang dipelopori oleh National Academy of

⁸⁴ Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Yogyakarta: Aditya Pustaka, t.t.), hal 5.

Sciences di Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelompokan dan penempatan anak dengan kebutuhan khusus di sekolah atau kelas terpisah tidak efektif dan bersifat diskriminatif. Layanan ini merekomendasikan bahwa pendidikan khusus yang bersifat segregatif sebaiknya hanya diberikan dalam kondisi tertentu berdasarkan identifikasi yang akurat.

Di Indonesia, seperti halnya di negara asalnya, pelaksanaan pendidikan inklusi masih menjadi perdebatan. Para pendukung pendidikan inklusi mengemukakan beberapa alasan, antara lain: (1) belum ada cukup bukti empiris yang mendukung anggapan bahwa layanan pendidikan khusus di luar kelas reguler memberikan hasil yang lebih baik bagi anak-anak, (2) biaya untuk sekolah khusus lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah umum, (3) sekolah khusus cenderung memberikan label berkelainan yang dapat berdampak negatif pada anak, (4) banyak anak dengan kebutuhan khusus yang tidak mendapatkan akses pendidikan karena tidak ada sekolah khusus di dekat mereka, dan (5) anak-anak dengan kebutuhan khusus perlu dibiasakan untuk hidup bersama masyarakat umum.⁸⁵

4. Ruang Lingkup Kurikulum Pendidikan Inklusi

a. Perencanaan Kurikulum Pendidikan Inklusi

Perencanaan kurikulum dalam pendidikan inklusi adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan

⁸⁵ Istiningsih, Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Klego 1 Kabupaten Boyolali, hal 8.

evaluasi yang dapat memenuhi kebutuhan semua peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, dalam lingkungan yang inklusif.

Menurut George Posner perencanaan kurikulum adalah proses mengidentifikasi kebutuhan pendidikan, menetapkan tujuan, memilih isi pembelajaran, dan menentukan metode serta evaluasi untuk mendukung pembelajaran. Dalam konteks inklusi, hal ini melibatkan adaptasi agar semua siswa dapat belajar bersama.⁸⁶

Suparlan mengemukakan bahwa dalam pendidikan inklusi, perencanaan kurikulum harus mencakup fleksibilitas, diferensiasi, dan akomodasi untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik, baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang tidak.⁸⁷

b. Organisasi Kurikulum Pendidikan Inklusi

Organisasi kurikulum adalah upaya mengatur dan menyusun elemen-elemen kurikulum agar dapat diimplementasikan secara efektif dalam proses pembelajaran. Dalam pendidikan inklusi, organisasi kurikulum berfokus pada penyediaan struktur dan sistem yang mendukung keberagaman kebutuhan siswa.

Menurut Hilda Taba organisasi kurikulum melibatkan proses pengelompokan isi pembelajaran dan metode agar siswa dapat memahami hubungan antara konsep-konsep. Dalam pendidikan inklusi,

⁸⁶ Posner G. J, *Analyzing the Curriculum* (New York: McGraw-Hill, 1995), hal 67-72.

⁸⁷ Suparlan, "Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan Sumbangannya Bagi Pendidikan Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 25(1), 56-" 01 (2015): 56–74.

ini mencakup desain kurikulum yang koheren untuk berbagai kemampuan dan gaya belajar siswa.⁸⁸

Menurut Stainback dan Stainback kurikulum dalam pendidikan inklusi harus dirancang untuk mengintegrasikan semua siswa ke dalam kelas reguler dengan menyediakan dukungan yang dibutuhkan, seperti adaptasi materi, modifikasi lingkungan belajar, atau layanan pendukung lainnya.⁸⁹

Hallahan & Kauffman mengemukakan bahwa dalam organisasi kurikulum pendidikan inklusi mencakup pembagian tanggung jawab antara guru umum dan guru pendukung, serta penggunaan pendekatan pembelajaran kolaboratif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung semua peserta didik.⁹⁰

c. Implementasi Kurikulum Pendidikan Inklusi

1) Kurikulum Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi

Kurikulum yang diterapkan dalam program inklusif pada dasarnya adalah kurikulum reguler yang digunakan di sekolah umum atau kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, mengingat beragamnya hambatan yang dialami oleh peserta didik berkebutuhan khusus, mulai dari yang ringan hingga berat, maka dalam pelaksanaannya di lapangan, kurikulum reguler perlu

⁸⁸ Taba Hilda, *Curriculum Development: Theory and Practice*. (New York: Harcourt, Brace & World., 1962), hal 35.

⁸⁹ Stainback W. dan Stainback S., *Curriculum Considerations in Inclusive Classrooms: Facilitating Learning for All Students* (Baltimore: Paul H. Brookes Publishing, 1992), hal 45.

⁹⁰ Hallahan D.P dan Kauffman J.M, *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education* (Boston: Pearson Education, 2006), hal 45.

disesuaikan dan dimodifikasi agar lebih cocok dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik setiap peserta didik.⁹¹

Pemerintah menetapkan bahwa kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensi mereka.⁹² Model kurikulum pendidikan inklusif ini terdiri dari berbagai komponen, yaitu:

a) Model kurikulum regular

Dalam model ini, peserta didik berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum reguler yang sama dengan teman-teman sekelasnya. Layanan khusus lebih difokuskan pada proses pembimbingan belajar, motivasi, dan pengembangan ketekunan dalam belajar.

b) Model kurikulum reguler dengan modifikasi

Pada model ini, guru melakukan penyesuaian dalam strategi pembelajaran, jenis penilaian, dan program tambahan lainnya sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Model ini dapat mencakup siswa yang mengikuti sebagian pelajaran dengan kurikulum reguler dan sebagian lainnya dengan program pembelajaran individual (PPI). Misalnya, seorang siswa

⁹¹ Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pengembangan Kurikulum, 2007).

⁹² Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Pasal 7., t.t.

berkebutuhan khusus mengikuti tiga mata pelajaran berdasarkan kurikulum reguler dan mata pelajaran lainnya berdasarkan PPI.

c) Model kurikulum PPI

Dalam model ini, guru merancang program pendidikan individual (PPI) yang disusun bersama tim pengembang yang terdiri dari guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orang tua, serta tenaga ahli terkait.

Model ini ditujukan untuk siswa yang mengalami hambatan belajar sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan kurikulum reguler. Siswa berkebutuhan khusus seperti ini dapat mengembangkan potensi belajarnya melalui program pendidikan individual (PPI) dalam lingkungan kelas reguler, sehingga mereka dapat mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan mereka.⁹³

Kurikulum PPI (Program Pendidikan Individual) atau yang dikenal dengan istilah Individualized Education Program (IEP) dalam bahasa Inggris adalah elemen penting dari pendidikan inklusif. Konsep pendidikan inklusif, yang menekankan pada kesetaraan, mengharuskan adanya penyesuaian dalam model pembelajaran yang dapat mengakomodasi perbedaan individu. Oleh karena itu, PPI atau IEP harus mendapatkan perhatian khusus.

PPI adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk satu peserta didik berkebutuhan khusus atau yang memiliki kecerdasan

⁹³ Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi., 2007).

atau bakat istimewa. Program ini harus bersifat dinamis, artinya harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan peserta didik. Penyusunan PPI dilakukan oleh tim yang terdiri dari orang tua atau wali murid, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus/PLB, dan peserta didik itu sendiri, yang semuanya bekerja sama dalam merancang program ini.

Idealnya, PPI disusun oleh tim yang terdiri dari Kepala Sekolah, Komite Sekolah, tenaga ahli dan profesional terkait, orang tua atau wali murid, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus/PLB, serta peserta didik itu sendiri.⁹⁴

Thomas M. Stephens menjelaskan bahwa IEP (*Individualized Education Program*) adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik peserta didik, serta layanan yang diberikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, IEP juga mengidentifikasi bagaimana efektivitas program tersebut akan diukur dan dinilai.

2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Inklusi

Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang cukup di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sangat penting untuk keberhasilan program ini. Setiap sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif perlu memiliki setidaknya satu Guru Pendamping Khusus (GPK). Selain itu, setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga

⁹⁴ Khofidhotur Rofiah, Febrita Ardianingsih, dan Sujarwanto, "Program Intervensi Terpadu Anak Berkebutuhan Khusus: Proses Pengembangan Kurikulum," Pendidikan LuarBiasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, 2019.

kependidikan yang memiliki kompetensi untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan kebutuhan khusus.⁹⁵

d. Evaluasi Kurikulum Pendidikan Inklusif

Evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif adalah evaluasi terhadap layanan pendidikan dan kinerja satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusif yang memenuhi standar nasional pendidikan sebagai bagian dari proses pengendalian, penjaminan, penetapan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.⁹⁶

Evaluasi dilaksanakan dengan prinsip: integratif, objektif, komprehensif, efisiensi, berkala, dan berkelanjutan. Evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif di satuan pendidikan merupakan efektivitas satuan pendidikan dalam mengembangkan kompetensi PDBK sebagai hasil pengukuran terhadap peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter.

Evaluasi kegiatan pelaksanaan pendidikan inklusif dapat menggunakan Model CIPP (context, input, process, product) yang mencakup sebagai berikut:

- 1) *Context evaluation* (Evaluasi Konteks) terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif meliputi unsur penilaian terhadap latar belakang, tujuan pendidikan inklusif, kerja sama terhadap instansi lain, dan penerimaan peserta didik.

⁹⁵ Peraturan Pemerintah Pasal 41 Nomor 17 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan., t.t.

⁹⁶ Farah Arriani, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif* (Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, 2022), hal 34.

- 2) *Input evaluation* (Evaluasi input) terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif meliputi sarana prasarana, kurikulum, dan sumber daya manusia.
- 3) *Process evaluation* (Evaluasi proses) terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif meliputi pembelajaran, pelayanan PDBK, pembiayaan, dan monitoring.
- 4) *Product evaluation* (Evaluasi produk) terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan melakukan penilaian terhadap dampak prestasi peserta didik dan hambatan penyelenggaraannya.

Setelah melakukan evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi kemudian dilakukan tindak lanjut untuk memaksimalkan pelayanan pada PDBK. Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia